

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembabakan sejarah di Indonesia terbagi ke dalam beberapa periode, salah satunya adalah masa Orde Baru (1966-1998). Pada periode ini, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Soeharto yang menggantikan posisi Soekarno dari kursi presiden pasca tragedi Gerakan 30 September (G30S). Setelah berhasil menduduki posisi sebagai presiden, hal yang diinginkan oleh Soeharto di awal kepemimpinannya adalah stabilitas politik sebagai syarat bagi kinerja perekonomian (Elson, 2005: 331). Maksud dari pernyataan Elson tersebut adalah Soeharto memposisikan pembangunan di bidang ekonomi sebagai panglima atau prioritas utama. Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan ekonomi, diperlukan pembenahan kehidupan politik negara terlebih dahulu. Dengan demikian, Soeharto memberlakukan aturan yang ketat dalam kehidupan politik demi terwujudnya stabilitas politik yang dapat menjamin terselenggaranya pembangunan ekonomi. Maka tidak heran apabila banyak kalangan yang menganggap pemerintahan Soeharto sebagai pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan otoriter tersebut merupakan salah satu cara untuk menciptakan stabilitas politik.

Stabilitas politik yang diciptakan oleh pemerintah Orde Baru membuat Soeharto berhasil mempertahankan jabatannya sebagai presiden hingga lebih dari 30 tahun. Stabilitas tersebut ditopang oleh fondasi kuat yang diciptakan sejak periode awal Soeharto berkuasa. Dalam mewujudkan stabilitas politik ini tentu Soeharto tidak sendirian, banyak tokoh di belakangnya yang ikut berperan dalam melanggengkan kekuasaannya. Ali Moertopo merupakan salah satu tokoh dengan peran yang sangat menonjol. Menurut Soehoed (1985: 167), Ali Moertopo

Dwi Setiyono, 2014

Peranan Ali Moertopo dalam mewujudkan stabilitas politik pada masa pemerintahan Soeharto (1966 - 1984)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

merupakan salah satu arsitek yang turut membantu Presiden Soeharto dalam menyusun landasan bagi Orde Baru.

Kiprah Ali Moertopo di bidang politik dibuktikan dengan beberapa jabatan strategis yang diberikan oleh Soeharto kepadanya, diantaranya adalah sebagai anggota Staf Pribadi (Spri) Presiden, Asisten Pribadi (Aspri) presiden bidang politik, Kepala Operasi Khusus (Opsus), Menteri Penerangan, hingga wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Berbagai jabatan strategis tersebut menjadikan nama Ali Moertopo tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan politik pada masa pemerintahan Soeharto. Melalui jabatan-jabatan tersebut pula Ali Moertopo memainkan perannya di bidang politik.

Banyak pengamat yang menyatakan bahwa kekuasaan Soeharto di Indonesia adalah pada saat ia diberi kuasa atas keadaan negara melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966. Salah satunya adalah Sulastomo, menurutnya Soeharto memiliki kekuasaan yang besar setelah diberi mandat oleh Soekarno melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966 pasca peristiwa G30S (Sulastomo, 2008: 164). Hal tersebut senada dengan pernyataan Pambudi (2009: 64) bahwa Supersemar telah menjadi pembuka jalan bagi Soeharto untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno untuk kemudian menjadi presiden.

Kedua pernyataan di atas secara tidak langsung menyatakan bahwa awal mula kekuasaan Soeharto di Indonesia adalah pada saat ia memperoleh mandat melalui Supersemar pada tahun 1966. Pada perkembangannya, Supersemar ini kemudian dikukuhkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melalui Ketetapan No. IX/MPRS/1966. Kekuasaan Soeharto kemudian berlanjut sampai dibentuknya Kabinet Ampera pada 28 Juli 1966 dimana Soeharto ditunjuk oleh MPRS sebagai Ketua Presidium Kabinet melalui Ketetapan No. XIII/MPRS/1966, yang berarti bahwa Soeharto bertindak sebagai kepala pemerintahan dalam Kabinet Ampera. Pada saat menjabat sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera inilah, Soeharto langsung memberi kepercayaan

Dwi Setiyono, 2014

Peranan Ali Moertopo dalam mewujudkan stabilitas politik pada masa pemerintahan Soeharto (1966 - 1984)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kepada Ali Moertopo untuk ikut serta dalam pemerintahan. Ali Moertopo diangkat menjadi salah satu dari 12 orang Staf Pribadi (Spri) Presiden. Keberadaan Spri tidak sedikit mengundang komentar miring, Jenkins (2010: 27-28) menganggap bahwa Spri merupakan “pemerintah bayangan” yang memiliki kekuasaan lebih besar dibanding kabinet, terutama dalam penyusunan kebijakan.

Pada perkembangannya, Spri akhirnya dibubarkan setelah hanya bertahan selama dua tahun (1966-1968). Kendati demikian Ali Moertopo tetap dipercaya oleh Presiden Soeharto dengan jabatan sebagai Asisten Pribadi (Aspri) Presiden bidang politik. Ia bersama anggota Aspri lainnya, yakni Soedjono Hoemardani dan Surjo Wirjohadiputro dapat dikatakan sebagai orang-orang terdekat Soeharto dalam menangani berbagai masalah.

Sebelum menduduki jabatan di Spri dan Aspri, Ali Moertopo telah berkiprah dalam suatu badan yang bernama Operasi Khusus (Opsus). Opsus merupakan operasi intelijen yang bertugas untuk mengakhiri konfrontasi dan melaksanakan proses normalisasi hubungan antara Indonesia-Malaysia. Dalam hal normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia ini, Ali Moertopo memiliki peran yang cukup penting, karena ia bertugas secara langsung untuk turun ke lapangan, yakni sebagai orang pertama bersama Benny Moerdani dan Sugeng Djarot yang masuk ke Malaysia untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut dengan para petinggi Malaysia mengenai penyelesaian konfrontasi (Tim CSIS, 2004: 16-17). Sebuah kewajaran jika Ali Moertopo dipercaya oleh Soeharto untuk melaksanakan tugas ini karena sebagaimana yang dikatakan oleh Mukmin (1991: 116) bahwa Ali Moertopo merupakan seorang perwira yang memiliki latar belakang yang luas dalam tugas intelijen, termasuk tugas-tugas politik yang bersifat terobosan. Upaya-upaya untuk mengakhiri konfrontasi ini berhasil mencapai puncaknya ketika terjadi kesepakatan normalisasi hubungan antara pihak Indonesia dengan Malaysia pada 11 Agustus 1966. Kesepakatan yang dilaksanakan di Ruang Pancasila, gedung Departemen Luar Negeri tersebut secara resmi menandai berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Dwi Setiyono, 2014

Peranan Ali Moertopo dalam mewujudkan stabilitas politik pada masa pemerintahan Soeharto (1966 - 1984)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Opsus kemudian berkembang, dari operasi intelijen untuk melaksanakan proses normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia, menjadi cap bagi segala kegiatan operasi intelijen, tidak hanya di bidang militer, namun juga di bidang politik (Cahyono, 1992: 65). Keberhasilan Ali Moertopo sebagai Kepala Opsus membuat Soeharto kembali memberinya tugas, namun kemudian tugasnya adalah rekayasa politik yang dikenal pula dengan sebutan penggalangan atau *conditioning*, yakni rekayasa dari atas atau *engineering from above* (Cahyono, 1998: 44). Rekayasa seperti ini utamanya ditujukan pada partai-partai politik yang dianggap dapat mengancam stabilitas negara. Menurut Nishihara seperti yang dikutip oleh Bhakti dkk (1999: 133), menjelang Pemilu 1971 Ali Moertopo melaksanakan tugasnya di Opsus dengan cara mengintervensi rapat-rapat atau musyawarah partai dan kemudian memanipulasi konvensi-konvensi partai untuk menciptakan krisis kepemimpinan yang pada akhirnya dapat memberikan kesempatan pada pemerintah untuk mendorong kepemimpinan yang dapat bekerja sama dengan pemerintah. Tugas yang diemban oleh Ali Moertopo tersebut membuatnya dipandang secara luas sebagai orang yang paling berperan dalam mengebiri partai-partai politik pada akhir tahun 1960-an (Jenkins, 2010: 52).

Baik Aspri maupun Opsus, keduanya merupakan badan yang dapat menimbulkan masalah, karena bersifat inkonstitusional atau tidak sesuai dengan konstitusi yang sebagaimana mestinya. Dalam hal pelaksanaan tugas, Aspri akan berbenturan dengan para menteri di kabinet, sama halnya dengan Opsus yang akan berbenturan dengan Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara). Pada Aspri dan Opsus inilah Ali Moertopo banyak berkecimpung, sehingga ia disebut oleh Jenderal Soemitro sebagai *free wheeler*, yakni orang yang langsung dikendalikan oleh sang pemimpin dan mempunyai akses kemanapun, tidak mempunyai organisasi namun memiliki mandat penuh dari pimpinan, dan dapat berhubungan dengan siapa saja atas nama pimpinan (Cahyono, 1998: 53).

Pada perkembangannya, jabatan Aspri ditiadakan sebagai akibat dari peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) tahun 1974. Jabatan Aspri yang dihapus

Dwi Setiyono, 2014

Peranan Ali Moertopo dalam mewujudkan stabilitas politik pada masa pemerintahan Soeharto (1966 - 1984)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tidak membuat Ali Moertopo kehilangan posisi dalam kedudukannya sebagai “orang penting”, karena ia kembali dipercaya untuk mengatasi permasalahan Timor Timur. Ali Moertopo berperan aktif sebagai pimpinan delegasi Indonesia dalam pertemuan dengan pihak Portugal untuk membicarakan masa depan Timor Timur. Setidaknya ada dua pertemuan penting antara Indonesia dengan Portugal dimana delegasi Indonesia dipimpin oleh Ali Moertopo, yakni pertemuan di Lisbon pada 14-15 Maret 1974, dan pertemuan di London pada 9 Maret 1975. Dalam pertemuan tersebut Ali Moertopo menyatakan bahwa opsi kemerdekaan penuh bagi Timor Timur merupakan opsi yang tidak relevan karena dua faktor utama, yaitu tidak adanya *natural resources* dan tidak tersedianya sumber daya manusia (Tim CSIS, 2004: 19). Pernyataan dari Ali Moertopo ini sangat logis karena jika Timor Timur memaksakan diri untuk merdeka secara penuh, maka dikhawatirkan akan masuk suatu kekuatan dari luar yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas di Timor Timur, lebih luas lagi di Asia Pasifik.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara Indonesia dan Portugal, dibentuklah satuan tugas intelijen dengan nama Operasi Komodo yang kemudian disebut Operasi Pra Seroja Tahap I (Subroto, 2005: 30). Dalam Operasi Komodo, Ali Moertopo bertindak sebagai wakil pimpinan mendampingi Yoga Sugama yang ditunjuk menjadi pucuk pimpinan. Operasi Komodo ini merupakan cikal bakal invasi militer Indonesia ke Timor Timur yang mencapai puncaknya dalam Operasi Seroja pada tahun 1975-1978. Berkat Operasi Seroja, Timor Timur berhasil berintegrasi dengan Indonesia, walaupun di kemudian hari invasi militer Indonesia ke Timor Timur ini dipermasalahkan oleh dunia internasional.

Setelah Pemilu 1977, Ali Moertopo yang sebelumnya tidak pernah berkiprah di kabinet, akhirnya mendapatkan jabatan menteri dalam kabinet Pembangunan III, yakni sebagai Menteri Penerangan. Jabatan yang diembannya sejak tahun 1978 tersebut membuatnya tidak lagi bisa menjadi *free wheeler*, kendati demikian Ali Moertopo tetap bisa memegang kendali atas stabilitas politik negara. Salah satu kebijakannya adalah pembekuan atau bahkan pencabutan Surat

Dwi Setiyono, 2014

Peranan Ali Moertopo dalam mewujudkan stabilitas politik pada masa pemerintahan Soeharto (1966 - 1984)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Izin Terbit (SIT) media massa yang beritanya dianggap mengancam stabilitas nasional. Salah satunya adalah Tempo, pada 12 April 1982 Ali Moertopo mengeluarkan keputusan yang isinya membekukan SIT Tempo karena melanggar kode etik pers yang bebas dan bertanggung jawab. Banyak orang percaya alasan utamanya karena Tempo memberitakan kampanye Partai Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta yang berakhir dengan kerusuhan. Pemerintah rupanya keberatan dengan berita tersebut, karena Golkar merupakan partai pemerintah (Pontoh, 2008: 101). Tidak hanya media cetak, media televisi juga dikendalikan demi menjaga stabilitas nasional. Pada tahun 1980, Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang pada saat itu merupakan stasiun televisi satu-satunya di Indonesia diubah statusnya oleh Ali Moertopo dari Yayasan TVRI menjadi Lembaga Direktorat TVRI yang berada di bawah Departemen Penerangan RI (Ishadi, 2012). Dengan adanya keputusan tersebut, dapat dikatakan bahwa TVRI menjadi kepanjangan tangan pemerintah yang kemudian bertahan hingga Orde Baru berakhir.

Pada tahun 1982 saat masih menjabat sebagai Menteri Penerangan, Ali Moertopo memelopori ide pemberian gelar “Bapak Pembangunan” bagi Soeharto. Ide ini dicetuskan oleh Ali Moertopo setelah merasa bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Soeharto mulai dapat dirasakan dampak positifnya oleh rakyat Indonesia. Ia sangat aktif dalam memobilisasikan pendapat umum dengan teknik ciptaannya sendiri yang disebut sebagai “Kebulatan Tekad” (Dhakidae, 2003: 269-270). Usahnya pun tidak sia-sia, pada sidang umum MPR bulan Maret 1983, Soeharto diberikan gelar “Bapak Pembangunan” yang dikukuhkan oleh Ketetapan MPR No. V/MPR/1983. Keberhasilannya ini tentu didukung oleh posisinya sebagai Menteri Penerangan.

Pada 1983, Ali Moertopo menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Pada periode ini ia lebih jarang tampil di media massa dibandingkan dengan periode sebelumnya ketika menjabat sebagai Menteri Penerangan. Kendati demikian ia masih memegang peranan dalam pengambilan

Dwi Setiyono, 2014

Peranan Ali Moertopo dalam mewujudkan stabilitas politik pada masa pemerintahan Soeharto (1966 - 1984)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto, yakni dengan memberikan saran, nasihat dan pertimbangan sesuai kapasitasnya sebagai pejabat DPA.

Peranan penting yang dimainkan oleh Ali Moertopo tidak hanya dapat dilihat dari jabatan-jabatan yang didudukinya, namun juga dari pemikiran-pemikirannya bersama lembaga studi yang didirikannya bersama Soedjono Hoemardani pada tahun 1971, yakni *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS). Banyak kalangan yang menganggap bahwa CSIS memiliki pengaruh besar atas kebijakan-kebijakan pemerintah, namun Soeharto dengan tegas membantahnya, menurutnya CSIS bukanlah perumus kebijakan pemerintah (Cahyono, 1998: 41). Dari sini dapat dilihat bahwa Ali Moertopo memegang peranan yang cukup besar. Lebih jauh lagi, Jenkins dalam bukunya *Soeharto & Barisan Jenderal Orba* menyebutkan bahwa Ali Moertopo merupakan salah satu dari empat orang (bersama Yoga Sugama, Sudomo, dan Benny Moerdani) yang tergolong dalam “kelompok inti lingkaran dalam” di sekitar Soeharto, khususnya pada periode awal Orde Baru (Jenkins, 2010: 27-29). Keempat orang yang tergolong kelompok inti lingkaran dalam ini tidak saja memiliki kedekatan hubungan tugas dengan Soeharto, tetapi juga kedekatan secara personal. Maka tidak heran apabila muncul satu pendapat yang diungkapkan oleh Krissantono (1991: 136) bahwa apabila berbicara mengenai Orde Baru, maka tidak mungkin melepaskan diri dari seorang Ali Moertopo, karena Ali Moertopo merupakan pejuang yang sebagian besar hidupnya diabdikan untuk Orde Baru. Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan “kalau raja Orde Baru adalah Soeharto, maka Ali Moertopo adalah patihnya” (Tim Narasi, 2009: 35). Menurut penulis, pendapat-pendapat tersebut membuat permasalahan menjadi lebih menarik untuk dikaji. Sehingga penulis merasa tertarik untuk membuktikan kebenaran pendapat-pendapat tersebut, seperti apa peran Ali Moertopo khususnya dalam upaya untuk mewujudkan stabilitas politik pada masa pemerintahan Soeharto.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, bahwa upaya konsolidasi politik yang dilakukan oleh Ali Moertopo dalam mendukung

Dwi Setiyono, 2014

Peranan Ali Moertopo dalam mewujudkan stabilitas politik pada masa pemerintahan Soeharto (1966 - 1984)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemerintahan Soeharto telah membawa dampak yang cukup besar bagi terwujudnya stabilitas politik, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Peranan Ali Moertopo Dalam Mewujudkan Stabilitas Politik Pada Masa Pemerintahan Soeharto (1966-1984)”** ke dalam sebuah karya tulis skripsi. Mengenai pembatasan periode penelitian, penulis berpendapat bahwa pada tahun 1966 setelah keluarnya Supersemar, Ali Moertopo mulai memiliki peranan penting dalam kehidupan politik Indonesia. Soeharto yang pada saat itu bertindak sebagai pengemban Supersemar dan menjabat sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera telah menjadikan Ali Moertopo sebagai salah satu orang kepercayaannya, yakni pada saat diangkat menjadi Spri Presiden. Penulis membatasi periode penelitian hingga tahun 1984, karena pada tahun tersebut Ali Moertopo wafat akibat serangan jantung.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Ali Moertopo untuk mewujudkan stabilitas politik Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto (1966-1984)?”. Untuk mengarahkan ruang lingkup penelitian dan mempermudah penulisan, telah disusun rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial-politik Indonesia menjelang kepemimpinan Soeharto?
2. Bagaimana peran Ali Moertopo dalam menangani permasalahan politik luar negeri?
3. Bagaimana peran Ali Moertopo dalam menangani permasalahan politik dalam negeri?
4. Bagaimana peran Ali Moertopo dalam Operasi Khusus (Opsus) untuk mewujudkan stabilitas politik?

Dwi Setiyono, 2014

Peranan Ali Moertopo dalam mewujudkan stabilitas politik pada masa pemerintahan Soeharto (1966 - 1984)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kondisi sosial-politik Indonesia menjelang kepemimpinan Soeharto, yakni sejak awal dekade 1960-an hingga beralihnya kepemimpinan nasional dari Soekarno ke Soeharto.
2. Mendeskripsikan berbagai upaya yang dilakukan oleh Ali Moertopo dalam menangani permasalahan politik luar negeri, yang meliputi upaya normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia dan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia.
3. Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Ali Moertopo dalam menangani permasalahan politik dalam negeri, yang meliputi penyederhanaan partai politik, pembatasan aspirasi politik umat Islam, serta penataan kehidupan pers dan perfilman.
4. Memaparkan peran Ali Moertopo dalam lembaga Operasi Khusus (Opsus) sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan stabilitas politik.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang terkait. Manfaat penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dalam bidang kajian sejarah nasional Indonesia, khususnya pada periode Orde Baru.
2. Memberi acuan pada pengembangan penelitian sejarah yang lebih lanjut mengenai sejarah Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto.
3. Memberi kontribusi positif terhadap pembelajaran sejarah di SMA, khususnya di kelas XII pada materi yang membahas tentang perkembangan bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru.

Dwi Setiyono, 2014

Peranan Ali Moertopo dalam mewujudkan stabilitas politik pada masa pemerintahan Soeharto (1966 - 1984)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. Memperkaya dan melengkapi penulisan karya ilmiah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia pada umumnya, dan khususnya di jurusan Pendidikan Sejarah.

1.5. Struktur Organisasi

Hasil penelitian ini akan disusun berdasarkan struktur penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini dipaparkan secara rinci mengenai latar belakang yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian, dan dilanjutkan dengan rumusan masalah yang diuraikan dalam beberapa pertanyaan penelitian. Selain itu, pada bab ini juga dipaparkan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, serta struktur organisasinya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penjabaran beberapa teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan berpikir yang dapat membantu penulis dalam penelitian ini. Selain itu, dipaparkan juga mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peranan Ali Moertopo selama berkecimpung di kancah politik pada masa pemerintahan Soeharto.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, dibahas mengenai langkah-langkah metode dan teknik yang digunakan dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber, serta analisis dan cara penulisannya. Metode yang digunakan adalah metode historis. Penelitian historis adalah suatu usaha untuk menggali fakta-fakta, dan menyusun kesimpulan dari peristiwa-peristiwa masa lampau yang didukung oleh langkah-langkah penelitian yang mengacu pada proses metodologi penelitian sejarah.

Dwi Setiyono, 2014

Peranan Ali Moertopo dalam mewujudkan stabilitas politik pada masa pemerintahan Soeharto (1966 - 1984)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

BAB IV UPAYA ALI MOERTOPO UNTUK MEWUJUDKAN STABILITAS POLITIK PADA MASA PEMERINTAHAN SOEHARTO (1966-1984)

Bab ini merupakan uraian penjelasan dan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam rumusan masalah. Terutama mengenai bagaimana peranan Ali Moertopo dalam upaya mewujudkan stabilitas politik Indonesia pada kurun waktu 1966-1984.

BAB V KESIMPULAN & SARAN

Dalam bab terakhir ini dipaparkan kesimpulan sebagai intisari jawaban terhadap permasalahan secara keseluruhan, setelah dilakukan pengkajian dari bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga mencantumkan beberapa saran sebagai refleksi dari hasil penelitian ini.

Dwi Setiyono, 2014

Peranan Ali Moertopo dalam mewujudkan stabilitas politik pada masa pemerintahan Soeharto (1966 - 1984)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu